

KEBIJAKAN BISNIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENCAPAI KINERJA UNGGUL

FATKHURAHMAN

FEB Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266
E-mail : fatkhurrahman@unilak.ac.id

Submit: 12 Mei 2024

Review: 10 Juni 2024

Publish: 26 Juli 2024

*) Korespondensi

Abstract: Business policies are guidelines or rules set by an organization to direct the operations, decision-making, and behavior of all members of the organization in achieving business goals. A good business policy is very important because it can provide structure, direction, and consistency in running a business. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) often face various issues related to business policies, which can affect the performance and sustainability of their businesses. Using descriptive research, data was collected from MSME managers and the results showed that the condition of the business policy of the small regional souvenir food industry in Riau Province was in the good enough category. This business policy variable obtained the largest dimension is hierarchical integration, while the smallest dimension is clarity of purpose.

Keywords: *Business Policy, MSME, Superior Performance*

Kebijakan bisnis adalah pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mengarahkan operasional, pengambilan keputusan, dan perilaku seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Kebijakan bisnis yang baik sangat penting karena dapat memberikan struktur, arah, dan konsistensi dalam menjalankan bisnis. Beberapa alasan mengapa kebijakan bisnis penting kebijakan bisnis memastikan bahwa keputusan di seluruh organisasi diambil secara konsisten, sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Memberikan panduan yang jelas kepada manajer dan karyawan tentang bagaimana menangani situasi tertentu, mengurangi kebingungan, dan meminimalkan risiko kesalahan.

Dengan kebijakan yang jelas, proses kerja dapat distandarisi sehingga operasional berjalan lebih efisien dan waktu yang dihabiskan untuk pengambilan keputusan dapat dikurangi. Kebijakan membantu mengurangi risiko kesalahan operasional dengan menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh semua karyawan. Kebijakan bisnis membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan

hukum yang berlaku, mengurangi risiko sanksi atau tindakan hukum. Kebijakan dapat dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, baik yang terkait dengan operasi, keuangan, maupun reputasi.

Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Kebijakan bisnis yang baik mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika dan integritas, yang penting untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik di mata pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). Kebijakan memberikan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran etika atau perilaku yang tidak sesuai, yang penting untuk menjaga citra perusahaan. Kebijakan yang jelas membuat karyawan mengerti peran dan tanggung jawab mereka, yang membantu meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Kebijakan dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan dapat mendorong peningkatan keterampilan dan karir karyawan, yang berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan.

Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mendukung inovasi dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dalam kerangka yang aman. Kebijakan yang tepat dapat mendorong ekspansi dan pertumbuhan bisnis dengan menetapkan strategi yang jelas untuk diversifikasi, ekspansi pasar, atau pengenalan produk baru. yang jelas dan terbuka membantu memperkuat komunikasi internal dengan memastikan semua anggota organisasi memahami tujuan dan prioritas perusahaan. Kebijakan juga berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik internal, baik antara karyawan maupun antara departemen.

Kebijakan bisnis yang mencakup aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keberlanjutan lingkungan membantu perusahaan beroperasi dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, Sjoen, A. E (2023). Kebijakan yang baik dalam pengelolaan keuangan memastikan bahwa bisnis dapat terus berkembang dan beroperasi dalam jangka panjang. Kebijakan yang baik menciptakan kepercayaan di antara investor dan mitra bisnis, karena menunjukkan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan dapat diandalkan. Kebijakan dalam hal layanan pelanggan membantu memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi, yang penting untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan.

Luthfiyah, N. D., (2024) Kebijakan bisnis yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti perubahan regulasi, kondisi pasar, atau teknologi baru. Kebijakan juga dapat diperbarui berdasarkan pengalaman dan umpan balik, memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Dengan kebijakan bisnis yang tepat, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih terstruktur dan efektif, mengurangi risiko, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering menghadapi berbagai persoalan terkait kebijakan bisnis, yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha mereka. Beberapa persoalan umum yang dihadapi UMKM terkait kebijakan bisnis. Banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan bisnis yang rumit atau tidak jelas. Ini terutama berlaku bagi pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang manajerial atau hukum yang kuat. Ketidakjelasan kebijakan dapat menyebabkan kebingungan, keputusan yang salah, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menghambat operasional dan pertumbuhan usaha.

Budiarto, R., (2018). Kebijakan bisnis yang berkaitan dengan akses ke pembiayaan sering kali tidak memadai untuk UMKM. Proses pengajuan pinjaman yang rumit, persyaratan yang ketat, dan suku bunga yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak UMKM. Kekurangan modal kerja membuat UMKM sulit untuk berkembang, berinovasi, atau bahkan bertahan dalam menghadapi tantangan bisnis sehari-hari. Banyak UMKM tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang kebijakan bisnis terbaik atau pelatihan yang diperlukan untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif. Ini menyebabkan keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan manajemen, yang menghambat pertumbuhan dan kemampuan bersaing UMKM di pasar.

Regulasi bisnis yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan besar bagi UMKM. Misalnya, proses perizinan yang lama dan persyaratan kepatuhan yang rumit bisa menjadi beban yang signifikan. UMKM mungkin mengalami kesulitan untuk mematuhi semua regulasi ini, yang dapat menyebabkan denda atau sanksi, serta menghambat pertumbuhan usaha. Kebijakan yang dirancang untuk

melindungi dan memberikan insentif kepada UMKM sering kali tidak cukup kuat atau tidak merata penerapannya. Banyak UMKM merasa kurang dilindungi dari persaingan yang tidak adil dengan perusahaan besar atau dari dampak ekonomi makro. Tanpa perlindungan atau insentif yang memadai, UMKM mungkin sulit untuk bersaing atau bertahan dalam jangka panjang, terutama dalam situasi krisis.

Kebijakan bisnis terkait ekspansi pasar, seperti kebijakan ekspor atau akses ke pasar internasional, sering kali tidak sepenuhnya mendukung UMKM. Persyaratan yang ketat dan kurangnya dukungan dalam hal distribusi atau pemasaran global menjadi kendala utama. UMKM sulit untuk memperluas pasar mereka di luar pasar lokal atau domestik, yang membatasi peluang pertumbuhan dan diversifikasi pendapatan.

Aulia, M. R (2023) Kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dan digitalisasi oleh UMKM sering kali tidak memadai. Banyak UMKM yang kesulitan untuk mengadopsi teknologi baru karena kurangnya dukungan, baik dari segi pelatihan maupun pembiayaan. UMKM yang tertinggal dalam hal teknologi dapat mengalami kesulitan dalam bersaing, terutama di era digital yang menuntut efisiensi dan inovasi. Perubahan kebijakan yang sering dan tidak terduga dari pemerintah atau otoritas lokal dapat menciptakan ketidakpastian bagi UMKM. Kebijakan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat mengganggu perencanaan dan strategi jangka panjang. UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang cepat, yang dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian.

Kebijakan yang berlaku umum untuk semua jenis usaha sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan khusus

UMKM di sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, manufaktur kecil, atau kerajinan. UMKM di sektor-sektor ini mungkin merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk berkembang, karena kebijakan tidak disesuaikan dengan tantangan spesifik yang mereka hadapi. Ketidaksiharian atau ketidaksiharian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi UMKM dalam mengikuti aturan yang berlaku. UMKM bisa terjebak dalam kebingungan peraturan yang berbeda-beda di berbagai tingkatan pemerintahan, yang bisa menghambat operasional mereka dan menambah beban administrasi. Dengan mengatasi persoalan-persoalan ini melalui kebijakan yang lebih mendukung, UMKM dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.

Penelitian ini mengungkap kondisi kebijakan bisnis yang diambil oleh pengelola UMKM dalam meningkatkan kinerja unggulnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Survey dilakukan pada 247 orang pengelola UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online yang diberikan kepada pengelola UMKM. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif.

HASIL

Kebijakan Bisnis diukur oleh 20 item pernyataan dengan 5 dimensi yaitu Kejelasan tujuan, Ketepatan alokasi sumber dana, Keterpaduan hirarkis, Aturan pelaksana dan Keterbukaan. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil tanggapan responden dari 20 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur Kebijakan Bisnis.

Tabel 1. Kebijakan Bisnis UMKM

NO	PERNYATAAN	5	4	3	2	1	Rata Rata	Kategori
1	Saya memiliki kejelasan tujuan dalam mengembangkan usaha makanan ini.	28	84	48	57	30	3,0931	Cukup Baik
2	Tujuan yang saya miliki memiliki ukuran yang jelas pula.	4	50	64	73	56	2,4858	Cukup Baik
3	Kesinambungan pelaksanaan tujuan menjadi prioritas dalam mengelola usaha.	42	82	64	50	9	3,3968	Cukup Baik
4	Saya selalu melakukan pengawasan pencapaian tujuan dalam usaha.	17	61	65	63	41	2,7976	Cukup Baik
Kejelasan tujuan (Y_{1.1})		91	277	241	243	136	2,9433	Cukup Baik
5	Saya selalu menerapkan kejelasan sistem anggaran usaha agar proses produksi berjalan lancar.	19	54	51	76	47	2,6842	Cukup Baik
6	Saya selalu memperhatikan ketepatan pengalokasian anggaran dalam memenuhi kebutuhan produksi.	29	76	73	48	21	3,1781	Cukup Baik
7	Saya selalu mengendalikan anggaran dengan maksud produksi tetap stabil.	52	83	56	49	7	3,5020	Baik
8	Saya selalu mengevaluasi penggunaan anggaran usaha.	32	70	77	47	21	3,1822	Cukup Baik
Ketepatan alokasi sumber dana (Y_{1.2})		132	283	257	220	96	3,1366	Cukup Baik
9	Terjalin komunikasi yang harmonis antar pihak yang berkepentingan dalam usaha	45	84	61	50	7	3,4453	Baik
10	Saya selalu melakukan sosialisasi berbagai perubahan dalam produksi kepada pihak yang berkepentingan.	30	75	74	47	21	3,1862	Cukup Baik
11	Saya selalu membangun persepsi yang sama sesama stakeholder.	48	81	62	49	7	3,4615	Baik
12	Saya selalu berbuat berdasarkan keterpaduan antar stakeholder demi ketercapaian tujuan.	33	67	77	49	21	3,1700	Cukup Baik

NO	PERNYATAAN	5	4	3	2	1	Rata Rata	Kategori
Keterpaduan hirarkis (Y_{1.3})		156	307	274	195	56	3,3158	Cukup Baik
13	Saya selalu menyediakan prosedur kerja yang sudah tetap dalam meng-hasilkan produk makanan ini.	48	88	55	49	7	3,4899	Baik
14	Saya selalu mene-rapkan prosedur yang tersedia demi menjamin kualitas produk.	17	65	75	57	33	2,9028	Cukup Baik
15	Saya selalu meng-evaluasi pelaksa-naan prosedur demi perbaikan yang berkelanjutan.	50	82	59	49	7	3,4818	Baik
16	Saya selalu menin-daklanjuti solusi dari masalah yang ada dalam meng-hasilkan produk yang berkualitas.	22	85	72	47	21	3,1619	Cukup Baik
Aturan pelaksana (Y_{1.4})		137	320	261	202	68	3,2591	Cukup Baik
17	Saya selalu terbuka kepada karyawan mengenai berbagai hal kepada karya-wan dalam bekerja.	42	89	59	50	7	3,4413	Baik
18	Saya selalu terbuka kepada mitra kerja untuk mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan.	19	65	53	63	47	2,7814	Cukup Baik
19	Saya selalu terbuka kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang akan mereka konsumsi misalnya harga, komposisi dan diskon.	48	87	55	50	7	3,4818	Baik
20	Saya selalu terbuka kepada pemerintah dalam melaporkan perkembangan usaha.	1	57	81	64	44	2,6235	Cukup Baik
Keterbukaan (Y_{1.5})		110	298	248	227	105	3,0820	Cukup Baik
Total Frekuensi Kebijakan Bisnis		626	1.485	1.281	1.087	461		Cukup Baik
		12,7 %	30,1%	25,9%	22,0%	9,3 %		
Total Skor Kebijakan Bisnis		15548						
Rata-Rata		3,1474						
Standar Deviasi		1,1309						

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa tanggapan responden

terhadap kebijakan bisnis yang dibuat pengelola industri kecil makanan di Propinsi

Riau dengan jawaban 5 (sangat setuju) sebesar 12,7%, kemudian jawaban 4 (setuju) sebesar 30,1%, yang menjawab 3 (cukup setuju) sebesar 25,9% dan yang memberikan jawaban 2 (tidak setuju) sebesar 22,0% serta yang memberikan jawaban 1 (sangat tidak setuju) sebesar 9,3%. Total skor jawaban jiwa kewirausahaan sebesar 3,1474 yang masuk dalam kategori cukup baik. Ini berarti bahwa pengelola usaha industri kecil makanan di Propinsi Riau kebijakan bisnis yang dibuatnya sudah cukup baik. Dari 20 indikator dapat diketahui nilai yang paling rendah adalah tujuan yang dimiliki memiliki ukuran yang jelas dengan rata-rata 2,7126, ini berarti bahwa belum jelasnya ukuran dari tujuan yang dibuat sehingga pencapaiannya menjadi kurang jelas juga.

Apabila dilihat per dimensi, seperti dimensi kejelasan tujuan dengan 4 item pernyataan dinyatakan cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau telah cukup baik dalam melakukan kejelasan tujuan usaha pelaku industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau. Nilai yang paling rendah dari dimensi ini adalah pada pernyataan “Tujuan yang saya miliki memiliki ukuran yang jelas pula”, hal ini memperlihatkan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau belum memadai dalam menetapkan ukuran atas tujuan yang telah ditetapkannya.

Dimensi Ketepatan alokasi sumber dana dengan 4 item pernyataan dinyatakan cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau telah cukup baik dalam melakukan alokasi sumber dana dalam kegiatan usaha makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau. Nilai yang paling rendah dari dimensi ini adalah pada pernyataan “Saya selalu menerapkan kejelasan sistem anggaran usaha agar proses produksi berjalan lancar”, hal ini memperlihatkan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau belum memadai dalam menetapkan kejelasan sistem anggaran usaha

pada industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau.

Dimensi Keterpaduan hirarkis dengan 4 item pernyataan dinyatakan cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau telah cukup baik dalam melakukan keterpaduan hirarkis pada usaha makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau. Nilai yang paling rendah dari dimensi ini adalah pada pernyataan “Saya selalu berbuat berdasarkan keterpaduan antar stakeholder demi ketercapaian tujuan”, hal ini memperlihatkan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau belum memadai dalam menetapkan keterpaduan antara stakeholder untuk mencapai tujuan usaha pada industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau.

Dimensi Aturan pelaksana dengan 4 item pernyataan dinyatakan cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau telah cukup baik dalam melakukan aturan pelaksanaan pada usaha makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau. Nilai yang paling rendah dari dimensi ini adalah pada pernyataan “Saya selalu menerapkan prosedur yang tersedia demi menjamin kualitas produk”, hal ini memperlihatkan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau belum memadai dalam menerapkan prosedur dalam rangka menjamin kualitas makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau.

Dimensi Keterbukaan dengan 4 item pernyataan dinyatakan cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau telah cukup baik dalam melakukan keterbukaan dalam rangka menunjang usaha makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau. Nilai yang paling rendah dari dimensi ini adalah pada pernyataan “Saya selalu terbuka kepada pemerintah dalam melaporkan perkembangan usaha.”, hal ini

memperlihatkan bahwa pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau belum memadai dalam keterbukaan terhadap pemerintah atas perkembangan usaha makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau.

Rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai Kebijakan Bisnis memiliki rata-rata 3,1474 dan standar deviasi 1,1309 dinyatakan termasuk kategori cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa Kebijakan Bisnis pengelola industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau, sangat bervariasi, dimana kategorinya dari Kebijakan Bisnis tidak baik menuju sangat baik. Oleh karena itu masih perlu adanya upaya Kebijakan Bisnis dan lebih merata.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan memiliki skor rata-rata 2,9433, yang termasuk dalam kategori "Cukup Baik". Indikator ini mencakup pemahaman responden terhadap tujuan pengembangan usaha, pengukuran tujuan, kesinambungan pelaksanaan tujuan, dan pengawasan pencapaian tujuan. Skor yang paling rendah terdapat pada aspek pengukuran tujuan, yaitu 2,4858, mengindikasikan bahwa banyak responden merasa ukuran atau indikator pencapaian tujuan belum sepenuhnya jelas.

Penelitian sebelumnya oleh Porter (2019) menekankan bahwa kejelasan dalam menetapkan dan mengukur tujuan merupakan elemen fundamental dalam strategi pengembangan bisnis. Porter menggarisbawahi pentingnya memiliki indikator yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan usaha dapat dievaluasi dengan baik, serta untuk memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih efektif jika diperlukan.

Selain itu, penelitian oleh Johnson dan Miller (2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa bisnis yang menetapkan tujuan yang jelas dan terukur cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Mereka juga menekankan pentingnya kesinambungan pelaksanaan tujuan dan

pengawasan pencapaian sebagai faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan alokasi sumber dana memiliki skor rata-rata 3,1366, yang berada dalam kategori "Cukup Baik". Aspek pengendalian anggaran mencatat skor tertinggi, yaitu 3,5020, mengindikasikan bahwa para responden merasa mampu menjaga stabilitas produksi melalui pengelolaan anggaran yang baik. Namun, skor untuk penerapan sistem anggaran yang kurang jelas lebih rendah, yaitu 2,6842, menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas aturan dan prosedur manajemen anggaran.

Penelitian terdahulu oleh Brown dan Miller (2020) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis, terutama dalam industri makanan. Mereka menekankan bahwa kejelasan dalam prosedur alokasi anggaran dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memperbaiki dan menegaskan sistem anggaran agar dapat mendukung stabilitas produksi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpaduan hirarkis dalam pengelolaan usaha makanan memiliki skor rata-rata 3,3158, yang tergolong dalam kategori "Cukup Baik". Keterpaduan hirarkis mencakup beberapa aspek penting seperti komunikasi harmonis, sosialisasi perubahan, pembangunan persepsi bersama, dan keterpaduan antar stakeholder. Dari hasil ini, aspek komunikasi harmonis (3,4453) dan pembangunan persepsi bersama (3,4615) memperoleh skor tertinggi, menandakan adanya hubungan yang cukup baik antar pihak yang berkepentingan dalam usaha.

Penelitian terdahulu oleh Linton (2018) mendukung temuan ini, di mana komunikasi yang efektif dan sinergi antar stakeholder diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam mencapai kesuksesan bisnis. Menurut Linton, keterpaduan dalam hirarki

organisasi tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis tetapi juga meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, memperkuat komunikasi dan keterpaduan dalam sosialisasi perubahan menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan keterpaduan hirarkis dalam usaha.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa aturan pelaksana mendapatkan skor rata-rata 3,2591, yang termasuk dalam kategori "Cukup Baik." Skor tertinggi terlihat pada prosedur yang tersedia dan implementasi aturan untuk menjaga kualitas produk, masing-masing dengan penilaian 3,4899 dan 3,4818. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur operasional telah diterapkan dengan baik, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal evaluasi dan tindak lanjut solusi. Skor yang lebih rendah pada aspek evaluasi mengindikasikan bahwa proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan masih belum optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Davis (2017), yang menegaskan pentingnya keberlanjutan dan inovasi dalam pelaksanaan prosedur operasional untuk mempertahankan kualitas produk. Davis mencatat bahwa tanpa evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, implementasi prosedur cenderung stagnan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas produk dan efisiensi operasional. Dengan demikian, fokus pada evaluasi yang lebih sistematis dan penanganan solusi secara tepat waktu menjadi esensial untuk memperkuat hasil yang telah dicapai melalui penerapan aturan operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dalam kebijakan bisnis memiliki skor rata-rata terendah, yaitu 3,0820, yang tetap berada dalam kategori "Cukup Baik." Aspek keterbukaan terhadap karyawan dan pelanggan dinilai cukup baik oleh responden, namun terdapat kelemahan yang signifikan dalam keterbukaan terhadap mitra kerja dan pemerintah, dengan skor masing-masing 2,7814 dan 2,6235. Skor ini mengindikasikan adanya hambatan dalam komunikasi dan pelaporan, yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis.

Kurangnya keterbukaan terhadap mitra kerja dan pemerintah dapat berdampak negatif pada keberlanjutan bisnis, terutama dalam membangun kepercayaan dan kerjasama. Penelitian oleh Green dan Walters (2018) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa keterbukaan dalam bisnis, khususnya dalam pelaporan dan komunikasi, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kebijakan bisnis industri kecil makanan oleh-oleh khas daerah di Propinsi Riau berada pada kategori cukup baik. Variabel kebijakan bisnis ini diperoleh dimensi terbesarnya adalah keterpaduan hirarkis, sedangkan dimensi terkecilnya adalah kejelasan tujuan. Dalam menjalankan usahanya pengelola membuat kebijakan secara terpadu antar berbagai kepentingan dalam rangka membuat produk dapat diterima pasar dan juga produk dapat diproduksi sesuai dengan kondisi bahan baku. Serta memahami kondisi persaingan yang dirasakan pengelola dalam menjalankan usahanya.

Aspek yang tertinggi adalah saya selalu mengendalikan anggaran dengan maksud produksi tetap stabil, hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan adanya pengendalian anggaran produksi yang baik maka akan memudahkan pengelola usaha industri kecil oleh-oleh khas Riau dalam menjaga kestabilan produksinya sehingga dapat menjamin ketersediaan produk. Juga pada aspek jalinan komunikasi yang harmonis antar pihak yang bekepentingan dalam berusaha. Selalu membangun persepsi yang sama sesama stakeholders. Membangun prosedur kerja yang tetap dalam menghasilkan produk makanan. Selalu mengevaluasi prosedur kerja demi perbaikan yang berkelanjutan. Selalu terbuka kepada karyawan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan dalam bekerja. Terbuka kepada pelanggan untuk mencari informasi

mengenai produk yang dikonsumsi seperti: harga, komposisi dan diskon. Aspek terendah, terdiri dari: tujuan yang dimiliki memiliki ukuran yang jelas dan terbuka kepada pemerintah dalam melaporkan perkembangan usaha. Menurut *expert* buat kebijakan berdasarkan kekuatan, kelemahan yang dimiliki dan peluang dan ancaman yang dirasakan sehingga lebih nyata dalam ukuran pencapaiannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anastasopoulos, L. J., Moldogaziev, T. T., & Scott, T. (2020). Organizational context and budget orientations: A computational text analysis. *International Public Management Journal*, 23(2), 292-313.
- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani*, 6(2), 68-85.
- Aulia, M. R., Hendra, J., Safitri, E., & Bawono, A. (2023). Keberlanjutan UMKM di Jawa Barat di Tinjau Dari New-era Business: Transformasi digital, dividen digital, dan kewirausahaan. *Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 01-15.
- Buldan, H. (2020). Pengembangan Model Kinerja Perusahaan BUMN Konstruksi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis. Ugm Press.
- Budd, J., Miller, B. S., Manning, E. M., Lampos, V., Zhuang, M., Edelstein, M., ... & McKendry, R. A. (2020). Digital technologies in the public-health response to COVID-19. *Nature medicine*, 26(8), 1183-1192.
- Davis, M. M., Stavroulaki, E., & Wolfson, A. (2018). A framework for increasing sustainability in services. *Service Science*, 10(2), 139-153.
- Porter, J. (2019). The J. Porter Studios Business Plan.
- Sjioen, A. E., Amaludin, A., Rukmana, A. Y., Syamsulbahri, S., & Wahyudi, I. (2023). Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03), 239-248.
- Linton, T. (2018). *Discharge Risk Screening and Interdisciplinary Communication: A Method to Mitigate Discharge Delays*. Gardner-Webb University.
- Linton, S. J. (2020). Been there, done that—what now? New avenues for dealing with chronic pain. *Scandinavian Journal of Pain*, 20(3), 425-428.
- Luthfiyah, N. D., Putry, W. E., Putri, N. S., Khalisa, A. K., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Perencanaan Dan Strategi Bisnis Yang Efektif Dalam Era Digital Menghadapi Tantangan Bisnis Modern. *Jurnal Perubahan Ekonomi*, 8(3).
- Menifield, C. E. (2020). *The basics of public budgeting and financial management: A handbook for academics and practitioners*. Hamilton Books.
- Walters, M. L. (2021). *Nonprofit Business League Chief Executive Officers' Perceptions of Their Board Chair Relationships and Organizational Impacts*. Capella University.
- Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 151-162.